

**KEBIJAKAN KEAMANAN NASIONAL  
SEBAGAI  
PENOPANG TERLAKSANANYA PEMILU 2004\*  
Oleh : Basyir A. Barmawi \*\***

**Yang saya hormati  
Para Peserta diskusi publik.**

**Assalamualaikum warahmatu"ahi wabarakatuh**

Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang sebesar -besarnya kepada Panitia pelaksana diskusi ini, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan **Materi kebijakan keamanan nasional sebagai penopang terlaksananya Pemilu 2004.**

Dalam kurun waktu tahun -tahun terakhir ini telah kita ketahui bersama maraknya masyarakat dalam menyampaikan pendapat / tuntutan di segala bidang mulai dari tuntutan kenaikan upah, penggusuran lahan, kebijakan pemerintah dan lain-lain bentuk sampai dengan penetapan partai peserta Pemilu tahun 2004. Koridor Demokrasi memang telah memberikan jalan untuk itu.

Barangkali dalam uraian saya kali ini, semata-mata hanya berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang berbagai cara dan langkah -langkah yang komprehensif serta dilakukan secara bersama -sama dalam menghadapi peristiwa -peristiwa sebagaimana uraian di atas, sehingga kita mampu lebih memperkaya "*knowledge* " dan "*experience* " para peserta diskusi, dengan harapan dapat memanfaatkannya berupa sikap terbaik yang harus dilakukan seandainya menemui/menghadapai berbagai peristiwa seperti itu.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, diawali dengan "*Bismillahirrahmanir rahim*", dengan segala kerendahan hati atas segala kekurangan dan kelemahan yang ada, perkenankanlah saya menguraikannya dengan secara mendasar dan memulainya sebagai berikut :

**Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengaruhnya terhadap perkembangan lingkungan strategik, khususnya perkembangan gangguan Kamtibmas.**

Diawali revolusi agraria (800 BC- 1500 M), industri ( 1500 -1970 M) dan kemudian pada saat ini kita semua hidup dalam abad revolusi informasi (1970- 2000 M) yang kadang-kadang disebut sebagai "*Knowledge age*", dapat kita saksikan bersama bahwa ilmu Pengetahuan dan Tehnologi telah berkembang begitu pesatnya, dan telah mampu merubah kehidupan manusia sedemikian rupa majunya, sehingga sesuatu yang tadinya dirasakan aneh, sukar , atau bahkan dirasakan tidak mungkin terjadi, sekarang ini telah menjadi suatu kenyataan yang sehari -hari dapat ditemukan dalam kehidupan manusia.

Dengan digunakannya satelit telekomunikasi ' kabel optik dalam jaringan internet, masyarakat mampu berkomunikasi " *On line* ", dengan jarak yang tambah jauh, dengan lebar

frekuensi yang tambah lama, tambah besar, dan jumlah informasi yang dipertukarkan bertambah padat.

Dimensi ruang, waktu dan gerak, nampaknya tidak lagi menjadi suatu yang membatasi kehidupan manusia. Dunia menjadi semakin transparan dan terbuka, kehidupan manusia disebagian belahan dunia ini telah berubah begitu rupa dengan berbagai kemudahan -kemudahan yang ditemui. Sebagai akibat dari hasil perkembangan tersebut, khususnya dalam berbagai bidang yang berhubungan dengan komunikasi / informasi, telah memaksa kehidupan manusia ke arah globalisasi.

Kehidupan global yang melanda sendi kehidupan manusia diberbagai sistem kehidupan manusia, telah membawa perubahan perubahan besar pada sikap, cara pandang dan perilaku manusia yang juga ikut terus berubah, sesuai perubahan - perubahan yang terjadi.

Di satu sisi kehidupan, realitas perjalanan kehidupan manusia telah menunjukkan bahwa manusia semakin pandai dan maju, sebagai suatu konsekuensi logis dari modernisasi di bidang pendidikan, peningkatan gizi dan kesadaran akan hidup sehat serta berbagai upaya yang sangat gigih di bidang penelitian, pengembangan dan latihan, untuk memecahkan berbagai kesulitan dalam kehidupan manusia.

Namun di sisi lain, " *teropong* " dengan " *Lensa jarak jauh* " yg bersifat " **super aktif** ", serta rasa ingin tahu yang sangat tinggi terhadap kehidupan ini, telah mampu juga melihat adanya kenyataan bahwa ada sisi kehidupan yang lain dan bukan tidak mungkin membawa ke arah kehancuran hidup manusia. Negara -negara seperti Sri Langka, Birma, India, Pakistan, Afganistan, Irak atau juga Somalia, Sudan, Uganda dan Nigeria, pecahnya Yugoslavia, Chekoslovakia dan Uni Sovyet, atau pertentangan gerakan separatis Bask dan Katalunia di Spanyol, Skotlandia dan Wales serta Irlandia, Kanada atau berbagai tempat lainnya, telah memperlihatkan kenyataan adanya pertentangan dan pertempuran yang membawa penderitaan, kemelaratan dan kesengsaraan.

Sementara itu dapat diketahui, tiga perempat dari 4,8 milyar orang penduduk dunia, hidup dalam keadaan sangat kurang beruntung. Mereka mungkin memiliki rumah kecil atau tidak sama sekali dengan persediaan makanan yang tidak cukup. Kesehatannya jelek, buta huruf, mengganggu dan masa depan mereka untuk suatu kehidupan yang lebih baik, suram atau sekurang -kurangnya tidak menentu. Karena itu, kiranya pembahasan tentang perbedaan global dalam standar kehidupan ini akan membawa pikiran kita (*Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, 1993* ).

Ambisi -ambisi manusia yang tidak peduli dengan berbagai efek negatif kegiatannya terhadap lingkungan, seperti : perburuan besar -besaran ikan paus, gading gajah Afrika, anjing laut, atau juga perambahan hutan, penambangan .-penambangan liar dll, telah mampu menciptakan perubahan -perubahan yang mengganggu atau bahkan merusak keseimbangan lingkungan hidup, dan efek lainnya berupa gejala memanasnya bumi, yang lebih dikenal dengan istilah " *efek rumah kaca* " / *greenhouse effect* (*Menuju masyarakat baru Indonesia, 1990*) dan bahkan di berbagai belahan bumi nusantara inipun terjadi beberapa masalah yang sangat mengharukan berupa persengketaan etnis yang menelan korban yang sangat banyak, benturan antar kelompok masyarakat dengan berbagai latar belakangnya, seperti pemekaran wilayah, dll. yang membawa masalah tersendiri, dan tidak begitu mudah dalam menanganinya.

Sejarah telah mencatat perjalanan hidup berbangsa dan bernegara yang penuh dengan dinamikanya, berupa rintangan-rintangan yang tidak sedikit mempengaruhi kestabilan jalannya pembangunan. Dan pada saat ini pun dapat kita rasakan bersama terpuruknya perekonomian negara kita, bersyukurlah hendaknya kita semua atas pemeliharaan "Nya" sehingga negara kita walaupun terpuruk di bidang ekonomi dengan kondisi yang sangat fluktuatif, yang tentunya sangat berkaitan erat dengan permasalahan di bidang politik dan dinamika yang tumbuh akibat keinginan untuk melaksanakan otonomi daerah, tetap utuh sebagai Negara Kesatuan yang berlandaskan Pancasila sebagai Dasar Falsafah Bangsa, dalam upayanya mencapai cita-cita Bangsa melalui pembangunan Nasional.

Sudut pandang makro dalam dinamika pembangunan selama ini, telah memperlihatkan kehidupan masyarakat yang menggejala ke arah disintegrasi sosial, pertumbuhan kelas menengah Indonesia pada masa orde baru yang pesat dengan jumlah yang membengkak, telah menyebabkan terbentuknya sistem dan hirarki sosial yang baru, kelas bawah yang mengalami mobilitas ke kelas menengah telah menanggapi perubahan kelasnya sebagaimana apa yang dikatakan oleh **Giddens** sebagai "*emancipatory politics*" yang menjadi penegasan kekuasaan individual dan pemisahannya terhadap ikatan-ikatan tradisional. Kelas menengah cenderung menyuarakan pengalamannya sendiri, sebagai kelas yang diuntungkan oleh penguasa di satu sisi, dan di sisi lainnya adalah sebagai kelompok yang "takut" akan kehilangan posisi/status.

Sedangkan realitas dalam perspektif mikro memperlihatkan munculnya tindakan-tindakan sosial yang dapat dianalisis sebagai bentuk akumulasi dari ketidakpuasan terhadap pemerintah dalam menegakkan keadilan/peradilan. Hal ini dapat diperlihatkan dengan banyaknya tindakan kekerasan yang dianggap sebagai suatu cara dan gaya yang hidup dalam masyarakat, dan dilaksanakan sebagai praktek sosial yang syah, dalam ukurannya sendiri. Dan juga sekaligus memunculkan sifat "*Ketidak perdulian sosial*", yang mengalahkan kepentingan sosial, dibanding dengan kepentingan individu.

Berbagai bentuk kejahatan terjadi secara meluas dan intensif, dan juga ditandai dengan bentuk penyimpangan yang mengganggu kepentingan umum, atau bahkan bentuk "**disorganisasi sosial**" berupa rendahnya ketaatan publik terhadap berbagai peraturan dan sesuatu yang bersifat komunal, seperti pengrusakan terhadap barang milik umum, yang bukan saja merugikan individu-individu, tetapi juga kepentingan publik. Di sisi lain masih bisa juga dilihat munculnya disfungsi sosial yang menunjukkan tidak berfungsinya institusi-institusi sosial. Pelayanan publik tidak dapat berlangsung dengan baik dan mulus karena berbagai kendala dalam sistem birokrasi, seperti gejala "*kleptocracy*" yang melanda berbagai pihak dalam pelayanan publik.

Persoalan-persoalan di atas menunjukkan terjadinya proses disintegrasi struktural yang mengakibatkan gagalnya integrasi kelompok masyarakat dalam satu akses dan kontrol, integrasi ke dalam sesuai dengan kepentingan umum yang ingin dicapai, integrasi dalam sistem hukum dan perundang-undangan dan integrasi fungsional yang harus diwujudkan. Proses disintegrasi semacam ini merupakan bahaya laten yang mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam merespons berbagai tantangan dan peluang ke depan dalam kehidupan mendatang.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah begitu berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan, serta berbagai konsekuensi logis tumbuh dan berkembangnya permasalahan

kehidupan yang terjadi, maka masalah-masalah yang dihadapi juga semakin kompleks dan sekaligus menjadi suatu tuntutan untuk menghadapinya.

Permasalahan tersebut juga dihadapi secara nyata oleh Polri, sebagai bagian integral dari supra struktur pemerintahan, khususnya dalam tugasnya menjaga ketertiban pribadi dari rakyat, terutama dalam upaya untuk memberikan pelayanan terbaiknya pada masyarakat sesuai dengan tugas pokoknya.

Sisi negatif yang tumbuh akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berhubungan langsung dengan pekerjaan-pekerjaan Kepolisian adalah peningkatan kualitas kejahatan dan pelanggaran, dimana kejahatan konvensional semakin tinggi tingkat mobilitas, kecepatan dan upaya menghilangkan jejaknya, serta berbagai bentuk : munculnya modus operandi baru dengan memanfaatkan semakin canggihnya teknologi.

Bentuk kejahatan dan pelanggaran yang ditemui membuktikan bahwa kejahatan dan pelanggaran telah semakin terorganisir dengan solidaritas sosial yang besar diantara anggota kelompoknya, terutama di dalam upaya saling melindungi dan mengamankan dirinya masing-masing kelompok maupun organisasinya.

Tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga baru di dunia bisnis dan perdagangan seperti : *telebanking, auto telling machine*, komunikasi data, sistem informasi manajemen yang berbasis komputer, jaringan komunikasi data, saham, valuta asing, perdagangan derivatif, *intellectual property right, credit card; future trading*, dan lain-lain, yang beroperasi di kalangan masyarakat, dimana masyarakat itu sendiri belum memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai (hanya sekitar 2 % penduduk yang sempat menamatkan pendidikan saljana yang kenaikannya dari tahun ke tahun sangat kecil, dan angka buta huruf mencapai 10 % , BPS, 1998), serta belum terdukungnya secara utuh oleh perangkat hukum yang mengatur proses kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan itu, juga telah mengundang kerawanan tersendiri berupa kejahatan pembobolan Bank, pembobolan ATM, Manipulasi Saham, Manipulasi Data, Pencurian Rahasia Bisnis, Kejahatan Hak Cipta, Merk, dan Patent, *Money Laundering*, Kejahatan Perpajakan, *Internasional Drug Trafficking*, dan lain-lain.

Keadaan seperti ini telah banyak mengundang kekhawatiran masyarakat internasional maupun regional, dan telah menjadi topik pembicaraan pertemuan Kepolisian dunia contoh : *pertemuan Aseanapol* di Jakarta Indonesia, yang menghasilkan kesepakatan bersama di bidang : "*Illicit Drug Trafficking, Fraudulent Travel Document, Mutual assistance in criminal Matter, Commercial Crime (Bank offense and card frauds), Panthomship Fraud; product counterfeiting and Pirancy* ", termasuk pula "*exchange of personel and training programme amongs Asean Police Force, Progress of Aseanapol data base and the review of Aseanapol Secretariat* ".

Demikian juga kejahatan dan pelanggaran yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan berbagai bentuk lainnya yang berhubungan dengan pembangunan, seperti sengketa pertanahan, sengketa-sengketa hukum, dan bahkan kerusuhan-kerusuhan yang bersifat massal, masalah preman yang akhir-akhir ini merebak menjadi topik pembicaraan masyarakat, remaja dan Narkotika berupa : Gang, perkelahan pelajar, serta penyalahgunaan Narkotik dan bahan-bahan Adiktif (*the problem of the street children, 1995* ), dan lain-lain. Dan bahkan hasil-hasil pertemuan lain

dalam konsep pembangunan, seperti : APEC, IMT -GT ( *Indonesia-Malaysia-thailand Growth Tri Angle* ), segitiga SUORI ( Singapura-Johor-Riau ), Sulawesi Utara dengan Philipina dll, akan lebih menuntut kemampuan pemberian jasa- jasa pelayanan keamanan yang lebih baik, dan sekaligus akan menjadi tantangan yang dihadapi pada saat ini dan mendatang.

Masih banyak sisi lain yang negatif dan dapat dikemukakan dalam tulisan ini, sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti warna kehidupan yang ditandai dengan kata-kata " **terbukanya kanal-kanal hawa nafsu manusia yang tidak terkendali, berupa penjelajahan, penciptaan terus menerus dalam bentuk simulasi**, seperti : *Virtual music, cyberporn, artificiallife, hypersexuality, prostitusi, cover girl, videogames*, sains tekno baru dll." Yang lebih mementingkan ilusi, gaya hidup, status, simbol, tanda dan prestise, sehingga sering dikatakan sebagai " **Lebih mementingkan gaya dari pada Makna** ", yang disebut sebagai " *Passionate capitalism*". (Sebuah dunia yang dilipat, Amir Piliang)

Betapa parahnya kondisi yang digambarkan tersebut di atas, dan Anthony Guidens dalam bukunya "*The third way*" menggambarkannya sebagai pertempuran antara "**manufactured uncertainty**" dengan "**ontological security**", dan kemudian menggambarkannya sebagai sebuah "**Juggernaut**", yaitu sebuah lori yang melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi dan sekali tidak terkendali, maka akan hancur dan menghancurkan yang lainnya.

Tentunya upaya -upaya yang harus dilakukan oleh Polri untuk menghadapi permasalahan kompleks yang tumbuh dan berkembang tersebut adalah suatu perencanaan untuk mengembangkan : "Eksistensi Polri" yang mampu memahami permasalahan yang timbul secara konsepsional, dan komprehensif ( dalam pengertian " ilmiah " ), serta bersifat strategik, dalam pengertian mampu dan tepat dihadapkan kepada upaya pemecahan perkembangan permasalahan yang ada.

Sebagai contoh, Pemahaman konflik yang memperlihatkan bahwa konflik itu terjadi karena 2 (dua) hal yaitu : **Identitas** (yang meliputi Suku, Agama, Ras, adat istiadat, dan bahkan bahasa dll. Dan **Distribusi** ( dalam arti sebagai suatu proses ketidakadilan dalam masalah ekonomi, politik, sosial maupun budaya, termasuk pemberian kesempatan kerja dan pembagian wilayah ). Atau juga pemahaman teori Gunung Es tentang **Sikap, perilaku dan konteks**, yang memperlihatkan bahwa pekerjaan Polisi seringkali dihadapkan hanya kepada masalah **Perilaku** (gunung es yang ada dipermukaan), dan tidak dibantu secara utuh oleh Instansi lain maupun masyarakat dalam menggarap **Sikap** (kebencian, iri hati, dengki dll) dan **Konteks** (baik ekonomi, politik, sosial dan budaya, termasuk pembagian wilayah) yang merupakan bagian bawah gunung Es.

### **Polri sebagai Penegak Hukum**

Peranan Polri dalam penegakan hukum adalah memelihara dan meningkatkan tertib hukum , membina ketentraman masyarakat, jadi secara sederhana dapat diketahui bahwa tujuan hukum itu adalah : Untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum, serta agar masyarakat mendapat penghargaan yang sewajarnya dan tidak dirugikan akibat tindakan -tindakan pihak lain. Dari sini jelas bahwa tujuan penegakan hukum secara lebih jauh tidaklah menegakkan hukum itu semata, tetapi harus mampu menciptakan rasa keadilan.

Penegakan hukum memiliki dua arti ialah menindak pelanggar hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Titik berat penugasan justru diarahkan kepada upaya-upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hukum. Penegakan hukum yang mengutamakan penindakan hukum setelah terjadi pelanggaran hukum, niscaya tidak akan mampu menciptakan tertib hukum, karena pelanggaran hukumnya sendiri telah terjadi. Keadaan semacam ini diwujudkan dalam strategi Binkamtibmas Polri yang mengutamakan penangkalan dan pencegahan terhadap gangguan Kamtibmas yang salah satu indikatornya adalah pelanggaran hukum, sebagai salah satu bentuk dari gangguan Kamtibmas.

Sebagai penegak keadilan setiap anggota Polri harus berlaku adil dan menegakkan keadilan di dalam masyarakat, sesuai pula dengan kedudukannya sebagai salah satu komponen *Criminal Justice System* (Sistem Peradilan Pidana) yang merupakan salah satu mata rantai peradilan pidana yang tidak terpisahkan dengan komponen yang lain, yaitu Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan bantuan Hukum

Terkait dengan kedudukan tersebut, maka setiap anggota Polri tetap berpegang teguh terhadap nilai-nilai yang ada dan berlaku sesuai kedudukannya, yaitu : ***Presumption of innocence, fight the crime -not the criminal, love humanity, help delinquency***, tidak semata-mata mengejar pengakuan tersangka yang seringkali menumbuhkan perilaku kekerasan dan juga harus tetap berpegang pada prinsip bahwa manusia tidak ada yang sempurna, masalah adalah sesuatu hal yang "nature" ada dan tumbuh pada kehidupan manusia, dan yang terpenting justru adalah "Pemecahan masalah itu sendiri / *How to manage conflict* " : yang kemudian dengan prinsip memecahkan masalah itu secara bersama-sama (*Group dynamic*), justru membuat manusia menjadi tumbuh maju.

Uraian diatas tadi akan lebih mempertegas lagi kepentingannya, apabila dihubungkan dengan " **Diskresi Kepolisian** " sebagai suatu kewenangan khusus yang melekat pada setiap individu anggota Kepolisian.

### **Polri Sebagai Pelayan Masyarakat**

Jatidiri sebagai pelayan masyarakat ini diletakkan sebagai suatu yang paling penting dalam kehidupan setiap anggota Polri. Status-status sebagai penegak hukum, pelindung dan pengayom, serta pembina Kamtibmas pada intinya adalah pelayanan yang harus senantiasa diberikan oleh Polri. Untuk itu *Stake Holder* (Pemegang Harapan) yang paling dominan adalah masyarakat. Masyarakatlah yang harus ditempatkan pada ranking teratas atas apa yang harus dilakukan. Jadi ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas kepolisian lebih banyak ditentukan oleh puas tidaknya masyarakat yang harus dilayani tersebut.

Di dalam pemolisian, banyak " *Stake Holder* " yang mengantungkan harapan atas pelaksanaan tugas Polri, antara lain adalah Pemerintah, Pimpinan-pimpinan Polri, orang-orang yang dirugikan karena tindak pidana, dan lain-lain. Jatidiri sebagai pelayan masyarakat ini sering dilupakan manakala sedang menghadapi keadaan yang mendesak atau perlu pengambilan keputusan segera.

Butler, dalam tulisannya menyampaikan bahwa : *"The nature of community Expectation, there are two perspectives from which to approach the determination of community expectation. The first, is to take a global view of the global community, all the people living on a subdivision, or in a small town or housing estate. The second is to identify individual cutomers of services - the victim of a crime, the person asking for directions ini the street, the witness to a road accident" (Police Management, 1992).*

Dengan demikian maka untuk bisa memenuhi harapan masyarakat kiranya perlu usaha - usaha untuk :

- a. Menentukan kualitas pelayanan masyarakat yang diperlukan.
- b. Menganggap bahwa permasalahan dalam pengelolaan kepolisian adalah perma- salahan bersama milik masyarakat sebagai stake holder.
- c. Melakukan dialog untuk memecahkan permasalahan kepolisian bersama masyarakat. ,
- d. Selalu konsisten berusaha memenuhi harapan masyarakat.
- e. Adanya keterbukaan dengan masyarakat.

**Elizabeth L Kearney**, mengatakan bahwa : *There's a poster on a wall in my office entitled; ii Why Customers leave ? ii, 1 % Die, 3 % Move, 5 % buy from friend, 9 % Prefer the competition, 14 % Judge all like business due to one bad encounter, 68 % leave because of indifference, rudenees, or lack of service from an employe. ( Customers run your company. 1990 ).*

Menyadari bahwa masyarakat adalah " *Customer* " atas jasa-jasa kepolisian sekaligus merupakan *Stake holder* yang paling dominan bagi organisasi Polri , maka yang menentukan spesifikasi pelayanan adalah masyarakat sendiri. Dalam setiap organisasi, misi utamanya adalah memuaskan *Stake holder*, yaitu pihak-pihak yang mempunyai harapan terhadap organisasi tersebut sekaligus yang dapat menentukan penilaian kinerja atas organisasi tersebut.

Yang bisa mendeskripsikan spesifikasi pelayanan yang diharapkan adalah masyarakat itu sendiri. Tidak berbeda dengan apa yang terjadi dalam organisasi Bisnis (berorientasi kepada keuntungan finansial / *profit oriented*), organisasi yang sukses dalam mengemban misinya adalah perusahaan-perusahaan yang berhasil menentukan ***Customer need*** (kebutuhan pelanggan) dan ***Customer want*** ( selera pelanggan ). Perusahaan- perusahaan melakukan survei pasar dan *Research and Development* ( penelitian dan pengembangan ) atas produk yang dihasilkan agar dapat memenuhi spesifikasi produk yang dikehendaki pelanggannya.

Langkah-langkah penting agar dapat memberikan pelayanan kepada pelanggan jasa kepolisian adalah sbb :

**Pertama**, identifikasi pelayanan Gasa kepolisian) yang dibutuhkan dan kehendaki masyarakat. **Kedua**, melakukan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan produk atau jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat, **Ketiga**, Produksi barang atau jasa yang memenuhi harapan pelanggan, seperti : alat pengaman kendaraan, rumah, atau jasa kepolisian berupa penciptaan rasa aman dan pelayanan yang cepat ,tepat dan memuaskan.

## **Polri Sebagai pengayom dan Pelindung Masyarakat**

Jatidiri Polisi di Indonesia dan di negara-negara lain semakin lama semakin mengembang tidak hanya terbatas pada menegakkan hukum saja, bahkan beranjak pada fungsi-fungsi yang lebih luas dan kompleks. Walaupun keadaan semacam ini tidak diimbangi dengan peralatan, jumlah personel, dan pendidikan yang menunjang. Hal ini juga dikemukakan Roberg, dalam bukunya "*THE CHANGING POLICE ROLE*", bahwa:

*Examiniton of the activity of police agencies around the world makes it apparent that they perform five basically different kinds of functions. There are:*

1. *Combating violation of the traditional criminal law (murder, rape, robbery, arson, etc).* memerangi pelanggaran hukum pidana tradisional, misalnya pembunuhan, perkosaan, perampokan, dan lain-lain.
2. *Combating violation of temporary convenience norm (traffic and health regulations, etc)* memerangi pelanggaran norma-norma yang mengatur kenyamanan dan keteraturan, misalnya peraturan lalu lintas dan kesehatan.
3. *Performing a miscellaneous group of service functions (operating an ambulance service; operating a jail system, escorting bank messengers, etc. , activities assigned to the police because they are usually the only governmental agency on duty 24 hours a day, 7 days aweek, 365 days a year) .*

(melaksanakan fungsi pelayanan lainnya misalnya : mengoperasikan ambulan, penjara, pengawalan bank, dan lain-lain yang dibebankan kepada polisi karena hanya polisilah yang bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan 365 hari setahun).

4. *Controlling or suppressing opposition to the government in power.* Mengawasi dan menekan sikap oposisi terhadap pemerintah.
5. *Maintaining forces for the possible repelling of military agression against the nation state.* Memelihara kekuatan menghadapi agresi militer terhadap negara.

## **Polri sebagai Pembina Kamtibmas**

Dengan kedudukannya sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat, serta kesadaran bahwa jumlah anggota Polri sangat terbatas, maka dimanapun anggota Polri berada atau bertugas, harus selalu mengusahakan ikut aktifnya masyarakat dalam upaya mengamankan dan menertibkan situasi dan kondisi di sekitarnya ( **Siskamtibmas Swakarsa** ).

Dalam mengaktualisasikan jatidiri sebagai pembina Kamtibmas ini justru .frekuensi bimbingan dan komunikasi dengan masyarakat, diarahkan untuk mewujudkan tumbuhnya kesamaan visi dan persepsi tentang Siskamtibmas Swakarsa. Demikian juga, partisipasi masyarakat hendaknya menjadikan prioritas utama agar prinsip pemolisian oleh masyarakat ( **Comunity Policing** ) benar-benar dapat terlaksana.

Paradigma kesaling tergantungan hendaknya diubah dari sifat yang transaksional menjadi transformasional, dimana orang saling berinteraksi dengan suasana kebebasan yang bersifat

sinergi. Dalam realitasnya maka setiap individu akan bergumul dengan rangsangan dan tanggapan dalam diri orang lain maupun diri sendiri, serta menghasilkan " **kesadaran diri yang semakin mampu untuk memiliki kesadaran orang lain**" (proses empati), kemampuan memahami " **hati nurani sendiri dan hati nurani kolektif** " dalam arti, menghargai perbedaan, rendah hati, selalu ingin bekerja sama dalam upaya menemukan visi dan nilai bersama, kehendak dalam kesalingtergantungan dengan prinsip " *Win-Win Solution* (menang-menang) " dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang berharga serta sumbangan imajinasi kreatif pada proses sinergi kreatif.

Dengan demikian pengembangan manajemen Polri berorientasi kepada visi tentang pemberdayaan ( *empowerment*) sebagaimana uraian di atas, dengan upaya berupa penyusunan program inisiatif kualitas total dan pemberdayaan ( ***total quality initiatives and empowerment*** ), dimana visi pelayanan masyarakat, kepemimpinan kemitraan, melibatkan potensi dan partisipasi masyarakat berinduk kepadanya. Visi *empowerment* inipun akan dengan sendirinya mewarnai tugas Polri yang lebih menitik beratkan langkah *preventif* dan *pre emtif* dibandingkan langkah yang bersifat *represif*, serta memantapkan kesadaran akan perlunya kecepatan informasi dan. garis komando serta pengendalian khususnya dalam menghadapi kecepatan pelayanan pada masyarakat.

Upaya-upaya ini bila dikaitkan dengan budaya yang ada, akan tetap bertitik berat kepada "**Perilaku Panutan**" yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan Polri.

Tanpa pelatihan, dapat dilakukan pengembangan para pelaksana dan manager, tetapi memerlukan waktu yang lama, sehingga tidak efisien bagi organisasi, atau bahkan tidak dapat menyediakan kualitas tenaga manusia yang memadai.

Pada tingkat yang paling bawah, pelatihan melibatkan respons fisik secara langsung, mengingat, dan mengkondisikan. Pada tingkat yang lebih tinggi, belajar mencakup menyesuaikan pengetahuan dan ketrampilan pada suatu tugas dan lingkungan yang baru. Pada tingkat selanjutnya, belajar merupakan proses yang sangat kompleks, dimana seseorang harus menerapkan aturan-aturan dalam bentuk kegiatan-kegiatan, memadukan berbagai tugas yang berbeda-beda, terutama yang berkaitan dengan ketrampilan hubungan antar pribadi (*interpersonal skills*). Yang paling rumit adalah apabila peserta dihadapkan dengan nilai-nilai dan sikap individu dan kelompok yang sudah mapan.

Karena pelatihan merupakan kebutuhan organisasi, maka setiap organisasi harus dapat mengidentifikasi permasalahan sumber daya manusia yang dihadapi, ialah dengan melihat adakah kesenjangan yang terjadi antara apa yang diharapkan dan kondisinya saat ini terutama yang berkaitan dengan sumber daya manusia, sehingga dapat dilakukan peningkatan kemampuannya.

Banyak diantara organisasi-organisasi yang tidak memahami permasalahan sumber daya manusia ini. Mereka mendidik dan melatih para anggotanya hanya karena mengikuti *trend*, mencari status atau prestise, dan terpengaruh oleh promosi penjual jasa pelatihan-pelatihan. Untuk mengatasi hal ini perlu dilakukan " Analisa Kebutuhan Pelatihan " (***Training Need Analysis***).

Masalah sumber daya manusia dan pendaayagunaannya masih memerlukan perbaikan disana sini, training masih bersifat asal dilaksanakan, pemahaman terhadap "***organization climate*** " sangat terlalu sederhana, apalagi untuk memahami therapi- .therapinya yang didasarkan kepada "

**terapi paradoksial** "nya eksistensialisme dan fenomenologi yang dikembangkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini.

Seringkali masalah pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kita terjebak dengan kepuasan semu, asal terlaksana dan menjadi bukti kepada pimpinan bahwa sudah dilaksanakan, dengan tidak atau kurang berorientasi kepada kriteria dan standar yang diharapkan dalam suatu pengembangan manajemen.

## **Perkembangan Dunia usaha**

**John Maynard Keynes**, salah satu ekonom terbesar di dunia usaha, mengemukakan bahwa kebutuhan orang untuk "**memegang uang**" (demand of money) ditentukan oleh 3 faktor, yaitu: *pertama*, untuk memenuhi kebutuhan transaksi (**transaction motives**), misalnya untuk membeli barang dan jasa. *Kedua*, untuk mengamankan factor yang tak terduga sebelumnya (precaucinary motives), misalnya mengantisipasi biaya kesehatan, dan yang *ketiga* adalah Spekulasi (speculation motives) yang pilihannya dapat dilakukan di Pasar Modal (stock market) atau di pasar uang (money market).

Perekonomian nasional sangat memerlukan dana untuk mendorong kebutuhan investasi, karena tabungan nasional tidak cukup mendanai investasi, maka kebijakan pemerintah kemudian mendorong "pasar Modal", dengan cara Mengizinkan harga saham yang berfluktuasi, dan mengizinkan investor asing bermain (mengingat bahwa investor lokal dananya terbatas). Maka dapat dilihat bahwa Pasar Modalpun menjadi marak sejak tahun 1989, dan bahkan pada tahun 1990, Bursa Efek Jakarta pernah mencatat sebagai "**The fastest growing in Asia**". Hanya saja karena terbuka untuk investor asing, maka kemudian menjadi sangat sensitif dan rawan untuk mengalaminya "efek dornino", contohnya : ketika Bank sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunganya sebesar 0,5 persen pada bulan Mei 2000, maka indeks harga saham di Jakarta ikut meluncur turun ke level dibawah 500 (prestasi tertinggi sebelumnya 720).

Di Indonesia, pasar uang mulai marak sekitar tahun 1990, seiring dengan iklim liberalisasi ekonomi atau keterbukaan sektor finansial, dengan ditandai dengan peluncuran paket deregulasi perbankan yang paling dramatis dalam sejarah sektor keuangan di Indonesia.

Paket 28 Oktober 1988 telah memberi kesempatan besar mengalimya dana asing melalui investasi asing langsung (foreign direct investment), investasi portofolio di pasar uang dan pasar modal (portofolio investment), serta utang luar negeri swasta (private foreign debt) berbentuk "commercial paper" yang beljangka sangat pendek, merupakan awal dari terbukanya kesempatan bagi para spekulan untuk bermain valuta asing di Indonesia, yang dianggap sebagai biang keladi terjadinya malapetaka krisis ekonominya.

Berbaumya masalah keterpurukan ekonominya yang sangat dramatis, yang juga berkaitan langsung dengan permasalahan perseteruan politik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberi kemudahan yang sangat hebat dalam sistem informasi dan data, dan persaingan global dalam arena bisnis, telah menambah keterpurukan suasana membangun ekonominya, dan menyudutkan posisi negara kearah ketidak berdayaan.

Oleh karena itu, secara umum Pemerintah harus bekerja keras untuk mampu mengambil langkah mengendalikan utang luar negeri swasta jangka pendek, termasuk pula utang luar negeri pemerintah dalam APBN, serta restrukturisasi utang-utang yang jatuh tempo baik swasta maupun pemerintah, dan terutama membangun "kredibilitas" nya untuk mendapatkan respek dan kepercayaan yang baik dari para pelaku pasar. Kecil kemungkinan para investor akan menanamkan investasinya di Indonesia, apabila kredibilitas respek dan kepercayaan tersebut tidak dapat ditumbuhkan dengan sebaik mungkin, padahal kita masih harus bersaing ketat dengan negara-negara lain yang juga memiliki kebutuhan yang sama dengan Indonesia.

Salah satu tuntutan kredibilitas respek dan kepercayaan tersebut adalah dalam bentuk "stabilitas keamanan" yang memberikan jaminan bahwa investasi tersebut tidak akan hilang, dan dapat berbagi keuntungan yang wajar.

Dan pada saat-saat keterpurukan seperti ini, maka kemudian stabilitas keamanan menjadi "**primadona**" yang didambakan oleh semua pihak.

Bersyukur kiranya kita semua kepada Tuhan YME, bahwa bangsa ini mampu memecahkan permasalahannya satu persatu, seperti masih terkendalinya masalah ketertiban dan keamanan, perbaikan ekonomi setahap demi setahap, pemecahan masalah "BOM", yang kesemuanya itu telah mengangkat kembali citra bangsa kita dimata Duma.

### **Penyelesaian masalah, seperti menyampaikan pendapat di muka umum.**

Dari seluruh uraian di atas tadi, kita mendapat gambaran umum tentang perkembangan iptek yang begitu hebat dengan berbagai implikasinya, baik yang menciptakan peluang untuk maju, maupun berbagai masalah baru yang kalau tidak ditangan dengan baik, akan membuat bangsa ini semakin terpuruk lagi.

Diuraikan juga tentang perkembangan usaha selama ini, yang walaupun selama 32 tahun orde baru, telah mampu memberikan keamanan dalam keamanan dan ketertiban, tetapi belum mampu memberikan pelayanan kesejahteraannya kepada masyarakat marginal, sehingga membuahkan reformasi seperti yang selama ini berlangsung.

Diuraikan juga tentang Polri dengan keberadaannya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum, sekaligus dengan berbagai kekurangan dan keterbatasannya, sehingga tetap mengharapkan keterlibatan masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban melalui Keamanan dan ketertiban Swakarsa, sebagaimana juga kehidupan masyarakat di seluruh duma yang tetap melibatkan masyarakat untuk membantu tugas-tugas Kepolisian.

Khusus tentang Euforia dari adanya reformasi global dengan tuntutan '**Good Governance**' yang antara lain berupa : Demokrasi, Keterbukaan, Lingkungan hidup dan Ham, maka munculah kegiatan masyarakat yang , **Merdeka menyampaikan Pendapat dimuka umum**' berbentuk: Unjuk rasa, Demonstrasi, Pawai, Rapat umum dan pemaparan melalui Media.

Kegiatan menyampaikan pendapat dimuka umum, diatur dengan Undang Undang NO2 Tahun 1998, dengan demikian semua kegiatan tersebut dilindungi Undang Undang, dan syah selama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang tersebut.

Perlu diketahui kegiatan unjuk rasa begitu menyita pekerjaan Kepolisian, Data menunjukan bahwa peristiwa unjuk rasa yang terjadi selama Tahun 2001 = 4274 kali, 2002 = 3026 dan Tahun 2003 sampai bulan September ini adalah sejumlah 2140 kali.

Polisi dalam melayani Penyampaian pendapat dimuka umum, akan memberikan :

- a. Surat keterangan izin bagi yang memberitahukan rencana kegiatan tsb sebelumnya. Dan bahkan mengatur rute perjalanan sedemikian rupa agar kelompok yang berdemo tidak bertemu dengan kelompok lainnya yang tidak sama pendapatnya, demi mencegah adanya bentrokan .
- b. Memberikan pengawalan kepada para demonstran, tidak saja untuk kepentingan masyarakat umum, tetapi juga bagi kepentingan keamanan dan keselamatan para demonstran itu sendiri
- c. Melakukan penjagaan pada rute-rute yang dilalui
- d. Mengawasi dan membimbing agar seluruh pelaksanaan unjuk rasa dapat tetap berjalan tertib) dan tidak mengganggu ketertiban bagi masyarakat lainnya. Misalnya: pengguna jalan lainnya (lalu lintas kendaraan maupun pejalan kaki).
- e. Mengawasi dan mengamankan sampai kegiatan selesai) termasuk rute perjalanan kembalinya.
- f DII.

Perlu kita ketahui bersama bahwa **MASSA** yang berkumpul disuatu tempat tertentu (**CROWD**) secara praktek, tidak selamanya berjalan Linier menjadi **MOB, RIOT dan TERROR**. Bisa saja dari Kerumunan (Crowd) tiba-tiba berubah menjadi RIOT.

**GUSTA VE LE BON** menjelaskan bahwa massa memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Individu dikendalikan massa)
- b. Bersifat Irrasional) emosional)
- c. Agressif dan Destruktif
- d. Tidak dapat membedakan diantara kenyataan dan khayalan, dan
- e. Seperti orang yg dihipnotis.

Untuk itu Polri telah melengkapi dengan berbagai Petunjuk Lapangan tentang : Penanggulangan unjuk rasa dan huru hara, penerapan taktik dan teknik penanggulangan unjuk rasa dan huru hara ) perijinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat, penggunaan dan pengamanan senjata api bagi anggota Polri dll. Dimana taktik dan teknik ini terus berkembang dan dikembangkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. .

Pola pengamanan massa yang tidak bergerak, dilakukan dengan cara :

- a. Mencegah terjadinya pelanggaran.
- b. Meredam emosi, mempertahankan kesadaran hukum dan selalu rasional
- c. Menciptakan kondisi untuk menyelesaikan masalah
- d. Memonitor kegiatan

Sedangkan bagi massa yang berkembang rusuh) dilakukan langkah-langkah :

- a. Melakukan isolasi dan menyarankan masyarakat yg tidak berkepentingan untuk meninggalkan tempat tersebut.
- b. Melakukan koordinasi
- c. Melakukan Negosiasi
- d. Melakukan pengarnanan
- e. Melakukan konsolidasi dan menjaga agar kerumunan lain tidak terprovokasi.

Yang dapat dikembangkan lebih lanjut dengan kegiatan lainnya, seperti :

- a. Melokalisasi tempat kejadian agar tidak meluas
- b. Mengidentifikasi/mengenali para pelaku
- c. Berusaha negosiasi dengan pimpinannya
- d. Melakukan penyelamatan korban luka ataupun meninggal dunia
- e. Meminta keterangan saksi maupun korban
- f Mengumpulkan barang bukti
- g. Dll yang kesemuanya didasarkan pada Scientific Crime Investigation.

### **Kesiapan Polri dalam mengamankan pelaksanaan Pemilu 2004**

Pemilihan umum merupakan peristiwa nasional yang sangat penting dan strategis, karena Pemilu merupakan salah satu wujud manifestasi dari demokrasi Pancasila yang berkorelasi secara signifikan dengan proses pembangunan nasional lima tahunan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa berhasil atau gagalnya program pembangunan lima tahunan ke depan sangat tergantung pada sukses atau tidaknya Pemilu yang tidak lama lagi kita laksanakan. Sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan kearifan dan kedewasaan kita bersama dengan cara melaksanakan Pemilu secara berakhlak dan berkualitas, dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya, atas dasar prinsip-prinsip Demokrasi yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil dan Beradab sebagaimana diatur dalam TAP MPR No. IV 1 MPR /1999 tentang GBHN Th 1999-2004 dan ketentuan Pasal 22 E UUD 1945 dan UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

Pemilu tahun 2004 merupakan Pemilu ke-2 yang dilaksanakan di era reformasi yang agak berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Perbedaan yang sangat menonjol yaitu penggunaan sistem proporsional terbuka dengan cara memilih tanda gambar dan memilih wakil-wakil rakyat, Presiden dan Wakil presiden secara langsung.

#### **Pada proses penyelenggaraan Pemilu 2004, Polri melaksanakan perannya sebagai:**

- a. **Unsur pengawas** mulai dari tingkat pusat, propinsi sampai tingkat kecamatan, dan kantor Polsek diberdayakan sebagai tempat Sekretariat dan tempat pendaftaran calon anggota Panwas Tingkat Kecamatan.
- b. **Pelaksana Utama** pengarnanan di TPS- TPS Pemilu.
- c. **Pelaksana Pengamanan** dalam masa karnpaye Pemilu.
- d. **Penengah atau Penyelesai konflik** dalam proses Pemilu.

Dalam melaksanakan peranya, Polri telah menyusun langkah-langkah kesiapan pengamanan dengan mengutamakan aspek pelayanan dalam arti agar Pemilu dapat berlangsung dengan tertib sesuai dengan keinginan bersarna dengan menggunakan Pola Umum pengamanan TPS 1 : 4 : 8. Namun apabila terjadi perubahan dalam dinamika di lapangan, pola tersebut dapat diubah setelah dilakukan analisa dan evaluasi terhadap situasi geografi, demografi, kerawanan ancaman gangguan keamanan dan situasi kondisi politik yang berkembang. Klasifikasi terhadap perkembangan situasi, dapat dikategorikan sebagai **TPS aman, rawan, dan sangat rawan**.

Dalam hal yang spesifik untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan negatif yang akan timbul pada tahap kampanye, masa tenang sampai dengan pemungutan suara telah disiapkan kekuatan cadangan di setiap tingkat kesatuan Polri, sebagai berikut :

- a. Tingkat Polsek 1 (satu) regu Polri dan l(satu) regu Linmas.
- b. Tingkat Polres 1 (satu) peleton Polri dan l(satu) peleton Linmas.
- c. Tingkat Polwil / Tabes 1 (satu) kompi Polri dan l(satu) kompi Linmas.
- d. Tingkat Polda 1 (satu) Batalion Polri.

Disamping kesiapan Polri yang telah diuraikan di atas rencana penggunaan kekuatan Polri dalam pengamanan Pemilu 2004 juga melibatkan berbagai aparat keamanan maupun potensi masyarakat tidak hanya aparat Kepolisian tetapi juga melibatkan satuan TNI dan Linmas yang dalam penggelarannya didasarkan pada prediksi ancaman berdasarkan perkiraan keadaan intelijen di setiap tahapan yang meliputi **tahap awal / persiapan, tahap inti dan tahap akhir dari Pemilu**.

## **Kesimpulan**

Sampai di akhir tulisan ini, saya ingin menegaskan bahwa situasi berkembang sedemikian rupa dan kompleks, sebagai akibat dari revolusi di bidang teknologi informasi, dan telah memacu persaingan yang juga semakin kompleks, dan sangat berpengaruh kedalam kehidupan dunia, termasuk Negara kita tercinta Indonesia.

Stabilitas Ketertiban dan keamanan sangat menentukan terlaksananya penyelenggaraan dunia usaha, terutama dalam kaitannya dengan penanaman modal asing. Kepercayaan (Trust) dari pasar, terhadap Negara kita saat ini, sangat ditentukan oleh adanya kepercayaan para pelaku pasar , terhadap situasi dan kondisi stabilitas ketertiban dan keamanan. Sehingga Ketertiban dan keamanan tetap menjadi primadona yang diharapkan oleh siapapun.

Polri sudah berusaha menggelar berbagai upaya untuk membenahi dirinya sedernikian rupa, dari mulai merekrut polisi-polisi baru, melakukan training-training tambahan, dengan berbagai pendekatan disiplin ilmu , menambah terus fasilitas yang mendukung operasional Kepolisian dan mencoba terus lebih memberdayakan seluruh anggota untuk lebih mampu menciptakan situasi dan kondisi yang mampu memberikan jaminan terselenggaranya dunia usaha dengan lancar , bebas dari rasa kekhawatiran dan ketidak pastian, yang memberikan kesempatan berusaha dan bekerja keras bagi para pelaku pasar .Khususnya dalam upaya menangani berbagai permasalahan yang berhubungan dengan iklim investasi dan industri , seperti : Unjuk rasa dan lain-lain termasuk suksesnya pelaksanaan Pemilu 2004 dalam arti dapat terselenggara dengan tertib dan aman sebagaimana harapan kita bersama dengan prinsip Bahwa ' **Demokrasi adalah upaya**

**menyelesaikan masalah, dan bukan justru membuat masalah baru , dan salah satunya adalah terselenggaranya Pemilu dengan tertib dan aman.**

Namun upaya demikianpun, butuh waktu penyadaran/sosialisasi terhadap masyarakat untuk secara bersama-sama menumbuhkan niat baik, arif dan penuh kedewasaan untuk berperilaku tertib sesuai ketentuan, konsistensi dalam sikap dan tindakan, kesabaran, keuletan. Dan apapun yg diperbuat untuk itu, nilainya tidak akan banyak berarti, tanpa bantuan masyarakat secara umum.

Oleh karena itu, Polri mengajak para peserta diskusi untuk mensosialisasikan pentingnya sikap dan tindakan terbaik yang harus diambil, sendainya menemui masalah sebagaimana diuraikan di atas tadi. Khususnya yang berkembang menjadi suatu kerusuhan. Mari bersama-sama untuk bahu membahu menjaga, mempertahankan dan membuat lebih baik situasi dan kondisi Kamtibmas, yang menjadi jaminan utama bagi terselenggaranya kehidupan yang lebih baik dan terhormat. Mari kita jaga stabilitas Keamanan dan ketertiban baik di bidang ekonomi, Politik, Sosial maupun budaya kita, demi masa depan anak bangsa. Dengan memulainya dari diri sendiri.

Sekian dan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 17 Desember 2003  
Basyir A. Barmawi

\* Ceramah disampaikan pada diskusi  
publik tgl 17 Desember 2003  
\*\* Irjen Pol, Kadivhumas Polri